

Strategi Komunikasi Publik Gugus Tugas Covid-19: Studi Komunikasi Publik Pada Program Larangan Mudik Lebaran Tahun 2021

Banyugiri Setra, Abd Razaq, Miftahul Arifin

Universitas Paramadina Jakarta

banyugirisetra01@gmail.com

Abstract

Indonesia and the world are being hit by the global Covid-19 pandemic which has paralyzed all human activities for several months. The incident then seizes public's attention and becomes the centre of public discussion. Various state policies around the world have been carried out to prevent the spread of Covid-19, including social distancing, Large-Scale Social Restrictions, and the implementation of the 'new normal' in various sectors. In this case, the current article specifically focuses on the issue of the mudik (exodus) restriction which has caught the attention of Indonesian public. Such travel restriction has caused a polemic between the government and migrants or migrant workers. These problems became complex when the mudik restrictions were started earlier on May 6, 2021. Despite the restrictions, the euphoria of the public in welcoming the Idul Fitri could no longer be contained although the complexity of the country in implementing this policy was still a problem, whether mudik was allowed or prohibited. Such perception was a polemic in our society. Therefore, the purpose of this journal article is to shed some of the answers to the many question posed in public perception. It is also used to provide more space and access to the public in understanding the ambiguity of the rules.

Keywords: Public Communication, Covid-19 Task Force, Covid-19 Handling

Abstrak

Indonesia dan dunia sedang dilanda pandemi global Covid-19 yang melumpuhkan segala aktivitas manusia selama beberapa bulan. Peristiwa tersebut kemudian menyita perhatian publik serta menjadi sentral perbincangan publik. Berbagai kebijakan negara di seluruh dunia dilakukan guna mencegah penyebaran Covid-19, diantaranya social distancing, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), penerapan new normal diberbagai sektor, utamanya dalam pembahasan jurnal ini penulis membagi fokuskan kedalam satu hal yaitu isu larangan mudik yang cukup menyita perhatian publik indonesia, dan disamping larangan mudik tersebut masih menjadi polemik antara negara dan juga masyarakat yang ada di perantauan. Problem masalah ini menjadi komplek ketika penyekatan arus mudik dimajukan menjadi tanggal 6 Mei 2021, namun diasamping itu euforia masyarakat menyambut hari raya idul fitri ini sudah tidak bisa dibendung lagi, kompleksitas negara dalam melakukan kebijakan inipun masih menjadi problem yaitu adanya simpang siur mudik diperbolehkan ataupun dilarang, persepsi inilah yang menjadi polemik di masyarakat kita saat ini.

Tujuan serta diterbitkannya jurnal ini semoga menjadi bagian daripada jawaban dari setiap pertanyaan yang diajukan didalam persepsi publik, sehingga sedikit banyaknya memberikan ruang serta akses kepada masyarakat mengenai ketidak jelasan aturan tersebut.

Kata Kunci : Komunikasi Publik, Gugus Tugas Covid-19, Penanganan Covid-19

Pendahuluan

Dunia saat ini sedang dilanda pandemi Covid-19 yang melumpuhkan segala aktivitas manusia dalam beberapa bulan. Peristiwa tersebut kemudian menyita perhatian publik dan menjadi sentral perbincangan publik dunia. Berbagai kebijakan di setiap negara pun turut diambil guna mengantisipasi penyebaran Covid-19 seperti *lockdown* hingga karantina wilayah. Tak terkecuali dengan Indonesia, yang juga mengalami pandemi ini. Di Indonesia sendiri perkembangan Covid-19 per bulan Mei 2021 mencapai 11.000 lebih jiwa yang terkonfirmasi positif Covid-19 dilansir dari *kompas.com*. Kenyataan ini menjadi tamparan keras bagi perkembangan kesehatan di Indonesia selama terjadinya pandemi Covid-19 yang terus bertambah jumlahnya.

Selain gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat, Pemerintah Indonesia juga diiringi dengan kebijakan guna mengantisipasi adanya penyebaran Covid-19 diantaranya Penerapan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa wilayah, selalu menggunakan masker guna meminimalisir terjadinya penularan Covid-19, disamping itu skala yang saat ini terjadi meskipun mengalami penurunan sekitar 15 000 kasus yang ada di Indonesia, penanganan yang seharusnya menjadi tolak ukur serta fokus pemerintah dalam hal ini masih belum menemukan titik terang, kasus yang saat ini terjadi masih mengalami ambang tengah, belum diketahui kapan ini akan terus meningkat ataupun menurun grafiknya, disamping itu pemerintah serta masyarakat dihimbau harus bekerjasama dalam penanggulangan covid ini. Berbeda jika kita hanya mengandalkan pemerintah dalam melakukan kebijakan dalam penanganan covid19 ini, kebijakan yang ditimbulkan hanya sekedar ironi publik yang menginginkan akses kebebasan dalam menghilangkan covid-19 tersebut.

Dalam kasus serta permasalahan yang berawal dari sinilah penulis membagi fokus kedalam beberapa kasus, khusus yang sedang ramai saat ini adalah kasus larangan mudik yang menjadi polemik dimasyarakat, sehingga persepsi masyarakat ini berawalkan dari kebijakan gugus tugas mengenai simpang siurnya larangan mudik ini dibuat. Problem larangan mudik ini tidak sebanding dengan kebijaksanaan dimasukkannya TKA asing asal India dan juga China pada tanggal 4 Mei tersebut masuk ke negara Indonesia pada jalur udara di Bandara Soekarno Hatta, apa yang salah disini? Dan siapa yang harus bertanggung jawab atas kebijakan ini dibuat? Mungkin masyarakat kita melihat fenomena tersebut menjadi dasar mengapa arus

mudik yang saat ini terjadi dan mengalami lonjakan yang cukup besar karena didasari dengan adanya kebijakan pemerintah yang mengalami disorientasi keputusan atas hal itu.

Disisi lain apa yang akan gagas dan dibahas oleh negara dalam hal ini, apakah efektifitas pelarangan mudik ini sebanding dengan tingkat kasus covid yang sampai hari ini mengalami penambahan ? Sementara selama masa larangan mudik lebaran 6 - 17 Mei 2021 tetap berlaku Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 13 Tahun 2021. Tujuan Addendum ini untuk mengantisipasi peningkatan arus pergerakan penduduk yang berpotensi meningkatkan penularan kasus antardaerah pada masa sebelum dan sesudah periode larangan mudik diberlakukan.

Berikut sarana transportasi apa saja yang dilarang dan dikecualikan untuk dioperasikan pada masa larangan mudik lebaran 6-17 Mei 2021:

1. Transportasi Darat yang Dilarang :

- Kendaraan bermotor umum, dengan jenis mobil bus dan mobil penumpang
- Kendaraan bermotor perseorangan, dengan jenis mobil penumpang, mobil bus, dan sepeda motor.
- Kapal angkutan sungai, danau, dan penyeberangan

2. Dikecualikan bagi :

- Kendaraan pimpinan lembaga tinggi negara RI
- Kendaraan dinas operasional dengan tanda nomor kendaraan bermotor dinas ASN, TNI, Kepolisian yang digunakan untuk melakukan dinas
- Kendaraan dinas operasional petugas jalan tol
- Kendaraan pemadam kebakaran, ambulans, dan mobil jenazah
- Mobil barang dengan tidak membawa penumpang
- Kendaraan pengangkut obat-obatan dan alat kesehatan
- Kendaraan yang digunakan untuk keperluan mendesak untuk kepentingan non mudik, berupa kendaraan untuk perjalanan dinas, kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka anggota keluarga meninggal, ibu hamil yang didampingi oleh 1 (satu) orang anggota keluarga.
- Kendaraan yang mengangkut repatriasi pekerja migran Indonesia, WNI terlantar, dan pelajar/mahasiswa yang berada di luar negeri, serta pemulangan orang dengan alasan khusus oleh Pemerintah sampai ke daerah asal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

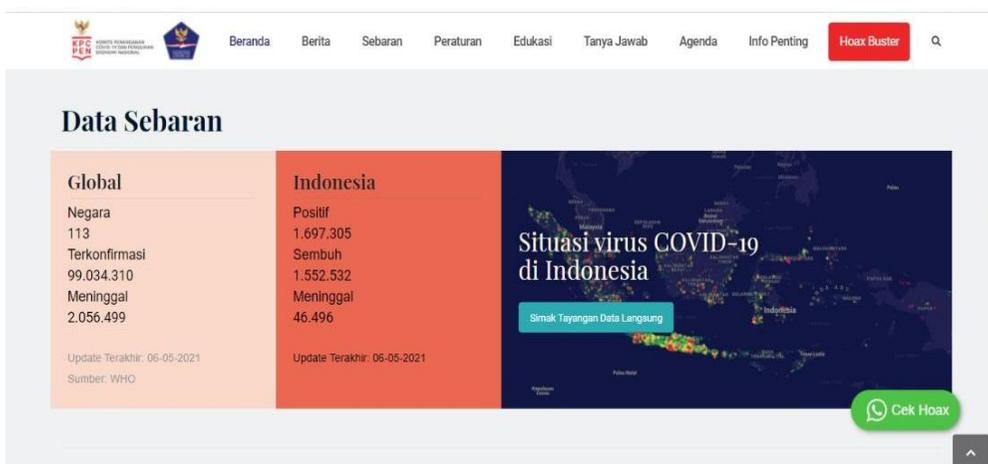
Sementara itu, untuk wilayah perkotaan, ada beberapa daerah yang masih boleh melakukan kegiatan saat larangan mudik diantaranya:

- 1) Medan, Binjai, Deli, Serdang, dan Karo (Mebodangro)
- 2) Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek)

- 3) Bandung Raya
- 4) Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, dan Purwodadi (Kedungsepur) e. Jogja Raya
- 5) Solo Raya
- 6) Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan (Gerbangkertosusila)
- 7) Makassar, Sungguminasa, Takalar, dan Maros (Maminasata) Sanksi:

Bagi masyarakat tidak memenuhi persyaratan melakukan perjalanan, akan diminta putar balik. Khusus pada kendaraan travel akan dilakukan tindakan tegas oleh kepolisian baik berupa penilangan atau sesuai UU yang ada.

Gambar 1. Perkembangan Kasus Covid-19 di Indonesia dan Dunia
(dilansir dari <https://covid19.go.id/> tgl 06/05/2021)



Masuknya varian virus Covid-19 dari luar negeri telah menyebar di berbagai daerah. Adanya temuan ini disikapi Pemerintah dengan meningkatkan upaya penanganan pandemi Covid-19 hingga mengeluarkan kebijakan pengetatan mobilitas pelaku perjalanan, baik dalam negeri dan luar negeri.

"Jika mutasi virus dibiarkan, maka akan semakin banyak varian Covid-19 yang muncul dan berpotensi berdampak buruk dalam upaya pengendalian Covid-19," juru bicara Satgas penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito dalam keterangan pers tentang perkembangan penanganan Covid-19 di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (6/5/2021) yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.¹

Pembiaran terhadap mutasi virus, akan berdampak buruk pada meningkatnya laju penularan akibat terjadinya perubahan pada karakteristik virus dan akan juga

¹ Lentera Today Online. Dilansir dari <https://covid19.go.id/berita/pengetatan-mobilitas-pelakuperjalananan-mencegah-penyebaran-mutasi-virus>

merubah sifat biologisnya. Lalu, akan menurunkan efektifitas vaksin karena umumnya vaksin dikembangkan dengan jenis-jenis virus yang spesifik. Juga dapat menurunkan akurasi testing karena lokasi-lokasi mutasi atau hotspot yang berbeda-beda pada setiap varian. Sehingga dapat menurunkan kualitas PCR yang memiliki target mutasi virus yang spesifik.

Disamping itu ada beberapa pernyataan dari lembaga gugus tugas yang utarakan oleh Wiko Adisasmoto dalam penyekatan pembatasan sosial untuk mencegah larangan mudik, diantaranya;

"Potensi efek negatif ini sedang dipelajari lebih lanjut, dan semua temuan hasilnya akan diberitahukan kepada masyarakat," imbuh Wiku, terkait mutasi virus, Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) telah mengklasifikasi jenis mutasi virus berdasarkan karakteristik yang ditimbulkan akibat mutasi. Yaitu varian of concern ialah varian yang sudah ditetapkan sebagai varian yang mengalami perubahan karakteristik dari karakteristik semula yang berupa angka dan huruf seperti B117, B1357 B11281 atau P1. Dan varian of interest, yaitu virus yang mengalami perubahan genetik namun karakteristiknya masih belum bisa dipastikan yaitu varian yang belum disebutkan sebelumnya. "Dan yang menjadi catatan ialah perubahan karakteristik di setiap varian berbedabeda," tambah Wiku. Pada prinsip virus Covid-19 adalah salah satu bentuk virus RNA (ribonucleid acid) yang secara alamiah jumlah kejadian mutasinya lebih banyak daripada jenis virus DNA (deoxyribonucleid acid). Karenanya bentuk virus Covid-19 sebagai virus RNA sangat wajar jika kemunculan variannya berkembang sangat cepat saat ini.

"Kembali saya ingatkan bahwa virus tidak mengenal batas teritorial dan setiap negara saling terhubung. Oleh karena itu salah satu upaya mengendalikan varian virus, khususnya yang sudah pasti meningkatkan infeksi adalah dengan mengatur mobilitas luar negeri," jelasnya.

Jika melihat berdasarkan data dari Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kementerian Kesehatan, terdapat 10 negara asal kedatangan dengan kasus positif terbanyak dalam periode 28 Des 2020 sampai dengan 3 Mei 2021. Diantaranya Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), Turki, Malaysia, Qatar, Mesir, Jepang, Singapura, Congo dan Libanon. Dan 5 negara teratas sumber positif WNA berdasarkan kewarganegaraan ialah India UEA, Qatar, Jepang dan Turki. Saat ini salah satu distribusi varian B1617 yang sangat kuat dan telah menyentuh semua benua di dunia menjadi dasar perlunya adaptasi berbagai kebijakan mobilitas termasuk perjalanan luar negeri. Jika mobilitas perjalanan tidak dikendalikan, maka akan menyebabkan kenaikan kasus Covid-19 yang mengandung varianvarian tersebut. "Kedepannya kita terus melakukan berbagai intevensi pencegahan demi pengendalian Covid-19 yang baik. Tidak hanya mengatur mobilitas perjalanan, tetapi juga meningkatkan upaya Whole Genome Sequencing (WGS). Peningkatan kualitas dan inovasi pada pelayanan kesehatan dan alternatif pengobatan," pungkas Wiku. <https://covid19.go.id/berita/pengetatan-mobilitas-pelaku-perjalananan->

Gambar 2. Data Kementerian Kesehatan dalam Penanggulangan Covid-19 (data RDP Kemenkes dengan Komisi IX DPR RI)

ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN 2021



Disamping itu pemerintah dan juga tim gugus tugas Covid-19 melangsir beberapa anggaran yang dikeluarkan untuk penanganan Covid-19 ini, dilansir proses anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan per-tanggal 8 Februari 2021 tersebut merupakan cara pemerintah dalam pencegahan sekaligus strategi pemerintah dalam mendorong keseriusan penangan Covid-19 ini dengan baik, disisi lain ada hal yang menjadi pertanyaan dalam hal efektivitas anggran yang dikeluarkan oleh Kemenkes tersebut apakah sudah efektif atau belum, sehingga mengakibatkan kasus Covid-19 saat ini mengalami keterlambatan, proses anggran tersebut tidak hanya sebagai elemen penting dalam mengupayakan pencegahan, karena akan muncul klaster parketik korupsi baru yang nantinya akan menimbulkan masalah baru di negara ini. Dilansir dari berbagai macam media dan juga gugus tugas Covid-19 ini, ada usaha yang dilakukan sedikitnya oleh pemerintah, yaitu sosialisasi, bantuan sosial, Kepres dan juga memasang baliho atau billboard di sepanjang jalan, namun hal tersebut mungkin dirasa belum cukup untuk menuntaskan kesadaran masyarakat dalam hal larangan mudik ini diberlakukan pada tanggal 6 Mei 2021, sehingga arus kepadatan yang terjadi masih menimbulkan perdebatan yang ada dimasyarakat.²

² Yuliana, Y. (2010). *Corona Virus Diseases (Covid-19): Sebuah Tinjauan Literatur*. Wellness and Healthy Magazine, 2 (1): 187-192
 Data Anggaran Kementerian Kesehatan dalam penanggulangan Covid-19 (data dari RDP kemenkes dengan Komisi IX DPR RI)

Tinjauan Pustaka

Komunikasi merupakan sebuah proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan untuk mempengaruhi tindakan atau perilaku mereka (Carl I.Hovland dalam Deddy Mulyana, 2016 : 68) Melihat situasi pandemi Covid-19 saat ini, yang membutuhkan himbauan keras terhadap penerapan protokol kesehatan maka komunikasi publik menjadi peran sentral dalam sosialisasi kebijakan. Komunikasi publik sendiri merupakan komunikasi antara seorang pembicara dengan sejumlah besar (khalayak), yang mungkin tidak bisa dikenali satu persatu. Biasanya komunikasi publik digunakan secara formal dan lebih sulit dilakukan dari pada komunikasi antarperibadi. Sebab, daya tarik tertentu menjadi pertimbangan kepercayaan publik terhadap isi pesan yang disampaikan oleh komunikator (Mulyana,2016:82).

Dalam komunikasi publik pesan yang disampaikan dapat berupa suatu informasi, ajakan, gagasan. Sarana komunikasi publik yang digunakan berupa media massa atau kolom mimbar. Komunikasi publik memerlukan adanya keterampilan dalam berkomunikasi secara lisan dan tulisan agar pesan yang disampaikan menjadi efektif dan efisien. Ciri-ciri komunikasi publik adalah terjadi ditempat umum (publik), juga merupakan peristiwa sosial yang biasanya telah direncanakan, terdapat agenda, beberapa orang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi-fungsi khusus dalam acara, acara-acara lain yang mungkin direncanakan sebelum atau sesudah agenda. Melihat ciri-ciri tersebut, komunikasi publik adalah cara yang tepat untuk memberikan himbauan kepada publik mengenai hal-hal yang penting seperti protokol kesehatan. Setelah itu, pelayanan publik menjadi cara ampuh diiringi komunikasi publik yang tepat untuk menekan pandemi Covid19 seperti saat ini.

Komunikasi publik sendiri merupakan suatu program yang dirancang berhubungan langsung dengan masyarakat dan pastinya melakukan proses komunikasi dengan masyarakat. Oleh karena itu, faktor komunikasi tidak bisa dilepaskan dari tingkat keberhasilan komunikasi publik tersebut sebab melalui proses komunikasi, komunikasi publik dapat dinilai kualitasnya. (Hardyansah, 2011). Menurut Tubb dan Moss (2006:24) terdapat lima faktor instrumen komunikasi berjalan dengan efektif yaitu pemahaman terhadap pesan oleh penerima, memberikan kesenangan kepada pihak yang berkomunikasi, memengaruhi sikap orang lain, memperbaiki hubungan, memberikan hasil yang sesuai dengan yang diinginkan dalam bentuk tindakan dari penerima pesan.

Pengaruh yang berkesinambungan antara komunikator dan komunikan terhadap pesan yang disampaikan memiliki andil dalam proses penyampaian publik. Kegagalan dalam komunikasi pelayanan bisa mengakibatkan terganggunya proses pengiriman informasi, sehingga tentu saja akan mempengaruhi kualitas komunikasi publik. Buruknya proses komunikasi publik menyebabkan pesan yang

tersampaikan menjadi buruk pula karena pesan tidak dapat diterima secara utuh. Hal demikian tentu akan memperburuk kepercayaan publik terhadap sebuah institusi pemerintahan. (Hardyansah, 2015:4). Oleh karena itu diperlukan strategi komunikasi publik guna menciptakan sebuah pesan yang dapat diterima dengan baik.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif analitis yang mendeskripsikan dan menganalisis fakta yang terjadi di lapangan dengan teknik pengambilan data wawancara dan pengamatan. Dalam penelitian ini memahami sebuah fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian dan yang menjadi objek penilaian yang secara alamiah tanpa adanya intervensi (Moleong, 2008:23). Penelitian ini melibatkan Gugus Tugas Covid-19 di salah satu yakni Gugus tugas covid-19 di platform media yang mana sebagai kajian komunikasi publik dalam menerapkan program larangan mudik lebaran di tahun 2021. Sumber data dalam penelitian ini adalah dengan hasil data dan riset di lapangan selama mudik lebaran berlangsung, disamping itu kami dari team penulis juga melakukan riset perkembangan dari berbagai media mengenai larangan mudik atau kampanye larangan mudik yang selalu di dengarkan, proses satu data dari sumber yang kita dapatkan yaitu merujuk kepada gugus tugas Covid-19 yang ada di pusat sebagai pintu utamanya perkembangan Covid-19 ini di umumkan. Program larangan mudik di tahun 2021 sendiri merupakan program yang digagas oleh pemerintah pusat guna fungsi pelayanan berbasis masyarakat mengenai Covid-19.

Peneliti mengambil lokasi ini dilatarbelakangi oleh strategi komunikasi publik yang dibangun kepada masyarakat berbeda dengan daerah lain serta memiliki kreativitas sendiri dalam menyampaikan dan dalam pelayanan. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis interaktif yang diacu pada Miles dan Huberman (1992:52) dimana terdapat tiga komponen utama dalam penelitian kualitatif yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan simpulan atas verifikasi data yang telah diperoleh.³

Hasil Dan Pembahasan

1. Program larangan mudik lebaran dalam bentuk penindakan tahun 2021

Gambar 3. Penyekatan serta pemeriksaan program larangan mudik lebaran tahun 2021
(data dari dokumen gugus tugas dan liputan 6)

³ Lexy J, Moleong. (2008). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Anonymous. . Jakarta, 6 Mei 2021 *Kota Jakarta Perketat Protokol Kesehatan*.



Program larangan mudik ini merupakan program yang digagas oleh pemerintah pusat guna meminimalisir penyebaran kasus Covid-19 yang ada di Indonesia, sesuai dengan tujuan penerbitan SE Nomor 13 Tahun 2021 tersebut adalah untuk pemantauan, pengendalian, dan evaluasi, dalam rangka mencegah peningkatan Covid-19 selama Ramadhan dan Idul Fitri 1442 H, aturan yang dimaksud dalam tatanan normal baru pada kondisi⁴ pandemi Corona Virus Disease 2019 antara lain; Rujukan SE Nomor 13 Tahun 2021 adalah:

- [UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular](#)
- [UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana](#)
- [UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan](#)
- [Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020](#) tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19
- [Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020](#) tentang Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, yang telah diubah dengan Peraturan

⁴ Anonymous. Jakarta, 6 Mei 2021 *Kota Jakarta Perketat Protokol Kesehatan*. Lentera Today Online. Dilansir dari : <https://covid19.go.id/berita/pengetatan-mobilitas-pelakuperjalananan-mencegah-penyebaran-mutasi-virus>

Presiden Nomor 108 Tahun 2020.

- [Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020](#) tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19
- [Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020](#) tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional
- [Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020](#) tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19
- Keputusan Rapat Kabinet Terbatas pada 23 Maret 2021
- Surat Menko PMK Nomor S-21/Menko/PMK/III/2021 tertanggal 31 Maret 2021
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19

Sumber Data : <https://jeo.kompas.com/naskah-lengkap-aturan-laranganmudik-2021>

Selain itu adanya program Larangan mudik lebaran ini juga membantu pelaksanaan program dari dinas kesehatan disetiap daerah dalam rangka perlindungan kesehatan secara mikro maupun makro.

2. Surat Edaran serta Peraturan Perjalanan yang di terbitkan oleh Satuan Tugas Covid-19 pada larangan mudik di tahun 2021.

Dalam menyikapi pertumbuhan Covid-19 dengan diberlakukannya larangan mudik tersebut, pemerintah pusat membagi beberapa instrumen protokol kesehatan yang harus dijalankan dalam angka 5, berlaku berlaku ketentuan khusus pengetatan mobilitas pelaku perjalanan dalam negeri (PPDN) pada periode menjelang peniadaan mudik yang berlaku dalam 22 april 2021 sampai dengan mei 2021 dan pasca peniadaan mudik yang berlaku pada tanggal 18 mei sampai dengan 24 mei 2021 dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Pelaku perjalanan penyebrangan wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes PCR/rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kuirun waktu 1 x 24 jam sebelum keberangkatan atau hasil tes negatif dari geNose sebelum keberangkatan sebagai syarat perjalanan dan mengisi EHC Indonesia.
- b) Pelaku perjalanan kereta api wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes PCR/rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kuirun waktu 1 x 24 jam sebelum keberangkatan atau hasil tes negatif dari geNose sebelum keberangkatan di stasiun.

- c) Pelaku perjalanan transportasi umum akan dilakukan tes acak rapid test antigen/test geNose C-19 apabila diperlukan oleh satuan covid-19 yang ada di daerah.
- d) Pelaku perjalanan transportasi darat pribadi wajibkan melakukan tes PCR/rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 1 x 24 jam sebelum keberangkatan atau hasil tes negatif dari geNose apabila diperlukan oleh satuan covid-19 yang ada di daerah.

Berikut merupakan beberapa ringkasan Adendum Surat Edaran No 13 tahun 2021 tentang “Peniadaan Mudik Lebaran Pada Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Corona Virus Desase 19 (Covid-19) Selama Bulan Suci Ramadan”.

Di samping pelarangan mudik lebaran yang disampaikan oleh pemerintah pusat sesuai dengan surat edaran yang diberlakukan tersebut, pemerintah melakukan kelonggaran bagi masyarakat yang sedang melakukan perjalanan dinas pekerjaan, adapun dalam hal melakukan mudim lebaran, masyarakat dihimbau untuk melakukan test terlebih dahulu, baik berupa Tes Antigen, Genose, Naupun Tes PCR, guna mengantisipasi penularan virus covid-19 di setiap daerah.⁵

Gambar 4. Peta penyebaran Covid-19 di Indonesia
(data dari dokumen Gugus Tugas Covid-19)



Dalam data serta peta gambar diatas, masyarakat dihimbau agar berhati-hati dalam melakukan interaksi sosial ketika di daerah masing-masing, bukan tidak mungkin masyarakat yang telah terpapar di kota besar akan menimbulkan kluster baru di daerahnya masing-masing, dibutuhkan kesadaran masyarakat dalam hal melakukan test covid-19 dahulu sebelum melakukan perjalanan, agar setidaknya meminimalisir resiko yang nantinya akan timbul di daerahnya masing-masing.

⁵ Hardiyansyah. (2011). *Kualitas Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gava Media

Ife, J. (2009). *Community Development in an Uncertain World: Vision, Analysis, and Practice*. Sydney: Cambridge University Press .

<https://covid19.go.id/peta-sebaran>

Dalam kurun waktu grafik penyebaran Covid-19 tersebut, Indonesia sekurang-kurangnya telah melakukan pengurangan jumlah kasus yang terdampak Covid-19 ini, sehingga elemen masyarakat sudah selayaknya membantu pengurangan atau bahkan menghilangkan kasus Covid-19 di tanah air dengan melakukan protokol kesehatan yang baik.

Kasus covid-19 ini bukan sesuatu hal yang tidak mungkin akan kembali lagi dengan jumlah yang sangat besar dan beresiko, melihat pertumbuhan klaster baru dalam peta diatas bisa kita simpulkan bahwa Indonesia akan sangat kesulitan menghadapi klaster baru ini ketika tidak didukung oleh elemen masyarakat yang lainnya, proses tersebut akan menjadi beban tersendiri mengingat negara kita sudah hampir satu tahun lebih menghadapi kasus covid-19 ini di Indonesia, menyimak data pasca lebaran minggu ke empat lebaran, data yang kami ambil dari juru bicara Satgas Covid-19 Prof Wiku Adisasmito dalam telekonferensi pers di Graha BNPB, Jakarta. yaitu sebagai berikut:

“Pemerintah mencatat kenaikan kasus positif corona setelah liburan Idul Fitri pada tahun ini lebih tinggi dibandingkan pasca lebaran tahun lalu.

JAKARTA (VOA) — Juru bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito mengungkapkan kenaikan kasus COVID-19 minggu ke-empat pasca Idul Fitri pada tahun ini tercatat lebih tinggi jika dibandingkan minggu ke-empat setelah lebaran tahun 2020.

“Setelah disandingkan pada minggu ke-4, ternyata kenaikan kasus pasca Idul Fitri pada tahun ini secara nasional, mengalami kenaikan yang lebih tinggi yaitu mencapai 112,22 persen. Sedangkan kenaikan kasus pada tahun 2020 adalah sebesar 93,11 persen. Kenaikan yang signifikan di tahun ini, tidak dipungkiri terjadi karena pada minggu keempat ini kenaikan kasusnya sangat signifikan jika dibandingkan dengan minggu sebelumnya. Dalam satu minggu saja terjadi kenaikan hampir dua kali lipat. Hal ini menyebabkan perbedaan yang signifikan pada keadaan di minggu ketiga lalu, dengan minggu keempat saat ini.” ujar Wiku dalam telekonferensi pers di Graha BNPB, Jakarta, Kamis (17/6).

Lebih lanjut, Wiku menjelaskan kenaikan kasus corona pada minggu ketiga pasca Idul Fitri tahun ini mencapai 50 persen, lebih rendah jika dibandingkan pada tahun lalu yang naik sekitar 80 persen. Namun, jika dilihat dari signifikansi kenaikan kasus positif setelah lebaran ternyata lebih tinggi pada tahun 2020. Pada tahun lalu, ujar Wiku Jawa Tengah mengalami kenaikan kasus hingga 758 persen, sedangkan pada 2021 mencapai 281 persen.

“Hal ini dapat terjadi karena pada tahun lalu, Indonesia masih berada di tahap awal penanganan pandemi, dan kita masih menyesuaikan diri terhadap situasi dalam melakukan penanganan COVID-19 yang tentunya masih serba terbatas. Keadaan

ini dapat memicu signifikansi kenaikan yang lebih tinggi,” tuturnya.⁶

Dalam penuturan diatas dapat sedikit saya garis bawahi adalah, kenaikan terus terjadi disetiap minggu setelah lebaran selesai, hal ini berakibat sangat buruk bagi indonesia kedepan, karena bukan hanya covid-19 saja yang saat ini menghantui masyarakat, namun varian barupun saat ini menghantui dan bahkan lebih berbahaya dibandingkan virus sebelumnya, dibutuhkan ketegasan serta kesadaran masyarakat dalam menyikapi persoalan tersebut, karena bukan tidak mungkin bahwa varian virus baru ini akan sangat berakibat buruk bagi ekonomi sosial masyarakat yang lainnya.

Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan didapat kesimpulan bahwa strategi komunikasi publik yang dilakukan oleh gugus tugas pada program peniadaan mudik atau larangan mudik sesuai dengan surat edaran no 13 tahun 2021, yaitu bisa disebut memiliki beragam strategi untuk melakukan fungsi-fungsi baik preventif maupun persuasif kepada warga masyarakat yang sedang melakukan nudik lebaran ini. Selain melakukan komunikasi kepada masyarakat, gugus tugas juga membentuk stuktur organisasi guna mendukung pelaksanaan pengetatan jalur mudik serta melakukan tes antigen atau geNose di tempat atau posko. Dalam struktur ini juga terbagi menjadi beberapa divisi, seperti divisi ketangguhan budaya, divisi ketangguhan kesehatan, divisi ketangguhan keamanan dan ketertiban, divisi ketangguhan kesehatan, divisi informasi dan publikasi serta divisi ketangguhan kesehatan. Selain itu gugus tugas juga menyediakan posko pemeriksaan kesehatan yang berguna sebagai pusat informasi utama bagi pemudik, disana juga tersedia ruang isolasi dan ruang test geNose sebagai sarana pendukung adanya program larangan mudik lebaran. Gugus tugas juga melakukan strategi komunikasi publik ke masyarakat diantaranya sosialisasi ke masyarakat, pendampingan pemudik terkonfirmasi, hingga melakukan peraturan yang mewajibkan masyarakat untuk sebaaiknya tidak melakukan perjalanan tanpa alasan yang kuat, proses tersebut merupakan cara pemerintah dan gugus tugas dalam melakukan kebijakan kontrol sosial dalam upaya menanggulangi penyebaran Covid-19 ini yang semakin meluas.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan didapati bahwa peran gugus tugas dan adanya larangan nudik di tahun 2021 ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam penanganan Covid-19 yang melibatkan masyarakat sebagai basis pelaku perjalanan mudik lebaran menjadi hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Keterbatasan dalam penelitian ini menjadi sebuah hal kewajaran mengingat keterbatasan waktu peneliti dalam melakukan pengamatan yang mana nantinya

⁶ <https://www.voaindonesia.com/a/satgas-kenaikan-kasus-covid-19-pasca-lebaran-2021-lebih-tinggi-dari-tahun-lalu/5932653.html>

dapat dilakukan penelitian lanjutan.

Daftar Pustaka

- Mulyana, Deddy. Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Hardiyansyah. (2011). *Kualitas Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gava Media
- Ife, J. (2009). *Community Development in an Uncertain World: Vision, Analysis, and Practice*. Sydney: Cambridge University Press
- Lexy J, Moleong. (2008). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, Deddy. (2010). *Ilmu Komunikasi : Suatu Pengantar*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Yuliana, Y. (2010). *Corona Virus Diseases (Covid-19): Sebuah Tinjauan Literatur*. Wellness and Healthy Magazine, 2 (1): 187-192
- Anonymous. . Jakarta, 6 Mei 2021 *Kota jakarta Perketat Protokol Kesehatan*. Lentera Today Online. Dilansir dari <https://covid19.go.id/berita/pengetatan-mobilitas-pelakuperjalananan-mencegah-penyebaran-mutasi-virus>
- Gugus Tugas Covid-19. (2021, mei 6). *Data larangan mudik lebaran* Dilansir dari <https://jeo.kompas.com/naskah-lengkap-aturan-larangan-mudik-2021> Anggaran kementerian kesehatan dalam penanggulangan covid-19 (dilansir dari <https://covid19.go.id/>)
- <https://www.voaindonesia.com/a/satgas-kenaikan-kasus-covid-19-pasca-lebaran-2021-lebih-tinggi-dari-tahun-lalu/5932653.html>